

**PERAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK INDONESIA TAHUN 2022-2023
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NISRINA ZAYYAN KAMILA

22323182

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**PERAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK INDONESIA TAHUN 2022-2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NISRINA ZAYYAN KAMILA

22323182

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

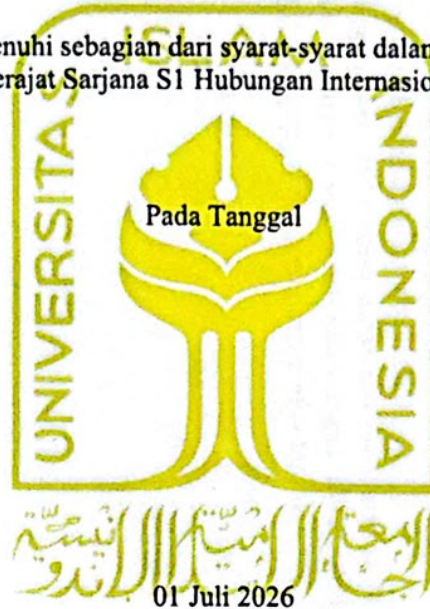
2026

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
2. Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.
3. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

18 Juni 2026



Nisrina Zayyan Kamila

DAFTAR ISI

SKRIPSI	0
HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR DIAGRAM	6
ABSTRAK	7
ABSTRACT	7
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	13
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	<i>13</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	<i>13</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	<i>14</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	<i>14</i>
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2	16
PERMASALAHAN HAK ANAK INDONESIA DAN PROFIL SAVE THE CHILDREN INDONESIA	16
2.1 Permasalahan Hak Anak Indonesia	16
2.2 Profil Save the Children Indonesia	21
BAB 3	28
PERAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA DALAM MEMBANTU PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI INDONESIA TAHUN 2022-2023	28
3.1 Peran Relief Save the Children Indonesia	29
3.1.1 Program Relief Save the Children Indonesia tahun 2022-2023	29
3.1.2 Program Relief Save the Children Indonesia dalam Merespon Pandemi COVID-19 di Indonesia (2022-2023)	34
3.2 Peran Social and Economic Development Save the Children Indonesia	37
3.2.1 Program Social and Economic Development Save the Children Indonesia tahun 2022-2023	38
3.3 Peran Political Roles Save the Children Indonesia	41
3.3.1 Program Political Roles Save the Children Indonesia tahun 2022-2023	

	42
BAB 4	47
PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Diagram Alur Penelitian

14

ABSTRAK

Pemenuhan hak anak di Indonesia masih menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan pemerintah. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan memiliki regulasi terkait perlindungan anak, namun pelanggaran hak anak terus terjadi dalam berbagai bentuk. Kondisi tersebut mendorong keterlibatan aktor non-negara, termasuk NGO, dalam mendukung upaya pemerintah memenuhi hak anak. Penelitian ini mengkaji peran Save the Children Indonesia dalam pemenuhan hak anak Indonesia pada tahun 2022-2023 menggunakan konsep *NGO Roles in International Politics* oleh Ahmed dan Potter (2006), yang mencakup tiga peran utama NGO : *Relief*, *Social and Economic Development*, serta *Political Roles*. Argumen sementara penelitian ini adalah bahwa Save the Children Indonesia menjalankan ketiga peran tersebut secara aktif pada periode tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Save the Children Indonesia menjalankan peran *Relief* melalui respon darurat terhadap bencana alam, krisis sosial, dan pandemi COVID-19; peran *Social and Economic Development* melalui program kesehatan, pendidikan, dan ketahanan ekonomi keluarga; serta peran *Political Roles* melalui advokasi kebijakan, edukasi publik, *agenda setting*, pengawasan terhadap pemerintah, dan keterlibatan dalam forum internasional.

Kata-kata kunci: Save the Children Indonesia, hak anak, peran NGO, pemenuhan hak anak.

ABSTRACT

The fulfillment of children's rights in Indonesia continues to face complex challenges involving social, economic, cultural, and government policy dimensions. Although Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child and has regulations regarding child protection, violations of the children's rights continue to occur in various forms. These conditions have prompted the involvement of non-state actors, including NGOs in supporting the government's efforts to fulfill children's rights. This study examines the role of Save the Children Indonesia in fulfilling the rights of Indonesian children in 2022-2023 using the concept of *NGO Roles in International Politics* by Ahmed and Potter (2006), which encompasses three primary roles of NGOs : *Relief*, *Social and Economic Development*, and *Political Roles*. The preliminary argument of this study is that Save the Children Indonesia actively carried out all three of these roles during that period. The findings indicate that Save the Children Indonesia fulfills the Relief role through emergency responses to natural disasters, social crises, and the COVID-19 pandemic; the Social and Economic Development role through health, education, and family economic resilience programs; and the Political Roles through policy advocacy, public education, agenda

setting, government oversight, and participation in international forums.

Keywords: Save the Children Indonesia, children's rights, NGO roles, fulfillment of children's rights.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak merupakan penerus dunia di masa yang akan datang. Mereka bukan milik siapapun selain dirinya sendiri, mereka berhak atas hidupnya (UNICEF, n.d.). Setiap manusia memiliki hak yang sama tetapi kita perlu menyadari bahwa pada usia dini, anak-anak termasuk kelompok rentan yang perlu perlindungan khusus untuk memastikan tumbuh kembangnya. Hak-hak anak sepenuhnya telah diatur dan diakui secara internasional melalui Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 yang menjamin perlindungan hak-hak anak dalam semua kapasitas (UNICEF, n.d.). Merupakan perjanjian hak asasi manusia tercepat dan terbanyak yang diratifikasi sepanjang sejarah dan berlaku hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia (UNICEF, n.d.). Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut setahun setelah disahkan yaitu pada tahun 1990, kemudian diadaptasi ke dalam Undang-Undang no.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan direvisi menjadi UU no.35 Tahun 2014 (PUSKAPA, n.d.). Walaupun berbagai kebijakan mengenai hak-hak anak telah dilakukan, realitanya masih banyak kasus kekerasan dan hak anak yang dirampas di Indonesia.

Dengan adanya kerangka hukum terkait hak-hak anak, tidak menjamin seluruh anak merasakan manfaatnya. Kenyataannya di Indonesia masih terus terjadi berbagai kasus kekerasan, pelecehan, perdagangan dan perampasan hak anak hingga saat ini. Menurut data KemenPPPA pada tahun 2022, 59,4% kasus kekerasan terjadi terhadap anak dengan tempat kejadian terbanyak pada rumah

tangga dan bentuk kekerasan berupa kekerasan seksual. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 62,2% anak menjadi korban dengan tempat kejadian dan bentuk kekerasan yang masih sama dengan tahun sebelumnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d.). Selain itu, hak anak yang belum dirasakan oleh seluruh anak di Indonesia yaitu pelayanan kesehatan berkualitas tinggi yang masih belum merata (TEMPO 2024). Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), masalah tersebut dikarenakan infrastruktur yang kurang di daerah pelosok, serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan pada anak (TEMPO 2024).

Kondisi perlindungan anak Indonesia diperparah dengan isu perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang akan berpotensi besar mempengaruhi kondisi kesehatan, mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta kemiskinan (UNICEF Indonesia 2020, iv). Nantinya dampak yang didapat akibat pernikahan anak tidak hanya dirasakan oleh anak yang dinikahkan, tetapi juga berdampak pada anak yang dilahirkan (UNICEF Indonesia 2020, iv). Sama halnya dengan kesehatan, pendidikan di Indonesia juga turut menjadi tantangan dalam pemenuhan hak anak. Sebenarnya pemenuhan akses pendidikan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tujuan memberikan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi anak Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2024). Namun meskipun telah diatur dalam UU, pada realitanya akses pendidikan masih belum menjangkau seluruh anak di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya

kesadaran masyarakat yang menganggap pendidikan bukan hal penting untuk masa depan (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2024).

Kondisi pemenuhan hak anak di Indonesia semakin kompleks dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020. Pandemi menjadi krisis multidimensi yang menghambat isu hak anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan, hingga tumbuh kembang anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2021). Selanjutnya menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di masa pandemi risiko Kekerasan Berbasis Gender (KBG) meningkat tajam bagi anak dan perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2021). Hal tersebut menjadikan tahun 2022 dan 2023 sebagai periode yang krusial, di mana berbagai program dijalankan secara masif dalam mendukung pemulihan hak anak Indonesia.

Dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak, pemerintah membutuhkan keterlibatan aktor non-negara baik organisasi nasional, internasional maupun *Non-Governmental Organization* (NGO) dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak. Salah satu NGO yang konsisten menyuarakan hak anak yaitu Save the Children. Awal terbentuknya organisasi ini pada tahun 1919 oleh Eglantyne Jebb di London, yang menjadi gerakan global pertama bagi anak-anak (Save the Children Indonesia, n.d.). Di Indonesia, Save the Children bekerja sejak tahun 1976 dan menjadi salah satu yang pertama dalam merespon Tsunami Aceh tahun 2004 (Save the Children Indonesia, n.d.). Pada tahun 2022 dan 2023, kegiatan Save the Children Indonesia berfokus pada lima tujuan utama pada kesehatan & gizi, pendidikan, perlindungan anak, pengentasan kemiskinan anak, dan tata kelola

hak anak (Save the Children Indonesia 2023, 6; Save the Children Indonesia 2024, 6).

Dalam studi Hubungan Internasional, Save the Children Indonesia sebagai aktor non-negara memiliki peran besar dalam pemenuhan hak-hak anak Indonesia. Peran aktor non-negara seperti NGO telah berkembang secara signifikan dalam dinamika global, yang mana NGO dianggap sebagai bagian penting dari masyarakat sipil (Ahmed and Potter 2006, 30). Melalui pendekatan tersebut, dapat dilihat bahwa Save the Children Indonesia sebagai aktor non-negara memiliki peran aktif dalam pemenuhan hak dan kebutuhan anak Indonesia. Peran tersebut lebih dari sekedar pelengkap upaya negara, melainkan bagian dari gerakan transnasional yang lebih luas. Dengan jaringan di lebih dari 120 negara, organisasi Save the Children mampu menyuarakan dan memperjuangkan isu anak global dalam gerakan lokal (Save the Children Indonesia, n.d.).

Save the Children Indonesia memiliki cita-cita global untuk anak-anak tahun 2030 dengan 5 tujuan utama yang dijalankan mulai tahun 2022 hingga 2024 yang meliputi (1). Awal kehidupan yang sehat, (2). Aman kembali ke sekolah dan belajar, (3). hidup bebas dari kekerasan, (4). Jaring pengamanan sosial & keluarga tangguh, (5). Tata kelola hak anak & kesetaraan gender (Save the Children Indonesia 2024, 6). Tujuan utama tersebut selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pada tujuan 3 (kehidupan sehat), tujuan 4 (pendidikan berkualitas), tujuan 5 (kesetaraan gender), serta tujuan 16 (perdamaian dan keadilan) (United Nations, n.d.). Kegiatan yang dilakukan oleh Save the Children Indonesia ikut mendukung capaian target pemerintah dalam memenuhi hak anak, serta masyarakat agar seluruh anak di Indonesia mendapatkan hak yang sama. Save

the Children Indonesia berkomitmen untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia, serta memiliki target anak tahun 2030 untuk bertahan hidup, belajar, serta terlindungi (Save the Children Indonesia, n.d.). Pada tahun 2030, Save the Children berharap tidak ada lagi anak yang meninggal karena sebab yang seharusnya bisa dicegah, kemudian seluruh anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas, serta tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun (Save the Children Indonesia, n.d.).

Pemilihan tahun penelitian 2022 dan 2023 sebagai fokus waktu dalam penelitian ini bukan tanpa alasan. Dalam dua tahun tersebut terjadi perubahan penting pada program kerja Save the Children Indonesia. Pada tahun 2022, program-program Save the Children Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks pandemi COVID-19, dibuktikan dengan data laporan tahunan mereka yang sebagian besar mencakup pada pencegahan penyebaran virus dan penanganan dampaknya (Save the Children Indonesia 2023, 9). Namun, memasuki tahun 2023 sebagai tahun transisi COVID-19 terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencakup bertambahnya jumlah anak dan masyarakat yang terjangkau secara langsung, penguatan kolaborasi dengan anak, serta pergeseran fokus program dari penanggulangan COVID-19 menuju upaya pemenuhan terhadap cita-cita global untuk anak tahun 2030 (Save the Children Indonesia 2024, 7). Pemilihan periode 2022-2023 juga didukung oleh ketersediaan Laporan Tahunan Yayasan Save the Children Indonesia tahun 2023 sebagai laporan terbaru yang resmi dipublikasikan. Hal ini memberikan jaminan data yang akurat dan terkini bagi penulis untuk meninjau perbedaan program antara tahun 2022 dan 2023 sebagai masa transisi yang penting.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian akan mengkaji pada peran Save the Children Indonesia dalam pemenuhan hak anak di Indonesia pada periode 2022-2023. Fokus yang akan didalami yaitu strategi program, aktivitas dalam pemenuhan hak-hak anak, perubahan pasca kegiatan, pendekatan kerjasama, serta tantangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi kajian Hubungan Internasional serta sebagai harapan pemenuhan hak bagi anak-anak di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Save the Children Indonesia dalam pemenuhan hak anak Indonesia tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis peran utama Save the Children Indonesia dalam upaya pemenuhan hak anak di Indonesia, dengan mengidentifikasi strategi dan pendekatan program yang dijalankan Save the Children Indonesia khususnya pada daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih akibat keterbatasan akses dalam menjangkau daerah tersebut,
2. Mengkaji program Save the Children Indonesia pada tahun 2022-2023 dalam upaya pemenuhan hak anak Indonesia, menganalisis perubahan yang terjadi pada anak setelah menerima manfaat program, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Save the Children

Indonesia dalam menjalankan program pemenuhan hak anak Indonesia periode 2022-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian ini akan berfokus pada peran Save the Children Indonesia dalam pemenuhan hak anak Indonesia periode 2022-2023. Pemilihan isu hak anak dipengaruhi oleh banyaknya anak yang kehilangan haknya dikarenakan secara fisik mereka lebih kecil daripada orang dewasa serta belum matangnya mental serta emosionalnya (Huberty, n.d.). Dalam penelitian ini, Save the Children Indonesia dipilih karena mereka berkomitmen untuk menyelamatkan anak-anak dengan segala upayanya untuk masa depan yang cerah bagi anak-anak Indonesia (Save the Children Indonesia, n.d.). Tahun 2022 dan 2023 dipilih karena pada periode tersebut terjadi perubahan penting, di mana tahun 2022 program mereka masih dipengaruhi pandemi COVID-19, sedangkan tahun 2023 menjadi masa transisi pasca pandemi dengan adanya peningkatan program sebagaimana tertulis dalam Laporan Tahunan resmi Save the Children Indonesia. Secara geografis, cakupan pada penelitian ini meliputi seluruh wilayah kerja Save the Children Indonesia pada periode penelitian, di mana tahun 2022 menjangkau 19 provinsi, dan 2023 menjangkau 16 provinsi di Indonesia (Save the Children Indonesia 2023, 8; Save the Children Indonesia 2024, 7).

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membahas tentang Peran Save the Children Indonesia dalam pemenuhan hak anak Indonesia periode 2022-2023. Berikut adalah tinjauan pustaka yang menjadi dasar teoritis dan referensi bagi penelitian ini:

Tinjauan pustaka pertama yang diambil oleh penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Galuh Hanesty Gunawan, Zahra Putri Listari dan Nurliana Cipta Apsari yang berjudul “Peran Save the Children Sebagai Lembaga Internasional Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak (2021)”. Penelitian ini membahas bagaimana Save The Children berperan sebagai lembaga Internasional dalam upaya pemenuhan perlindungan hak anak pada Save the Children Inggris untuk kemudian dibandingkan dengan penerapan pada Save the Children Indonesia (Gunawan, Listari, and Apsari 2021, 116). Dalam pembahasannya, penelitian ini akan memberikan informasi mengenai peran Save the Children dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan rentang waktu 2015-2021. Dengan menggunakan metode *literatur review*, penelitian ini tidak hanya membahas terkait peran Save the Children dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, tetapi juga mengaitkannya dengan poin *SDGs* nomor 16 - Perdamaian, keadilan dan Kelembagaan yang kuat (Gunawan, Listari, and Apsari 2021, 116).

Tinjauan pustaka yang kedua ditulis oleh Febrina Wimartha, Novriest Umbu Walangara Nau dan Triesanto Romulo Simanjuntak dengan judul “Implementasi Tujuan Pembangunan Nasional Terkait Eksploitasi : Peran Save the Children Terhadap Kasus Pekerja Anak Di Sulawesi Selatan (2023)”. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu kualitatif melalui pemaparan data pada beberapa studi kasus. Pada penelitian ini para penulis bertujuan melihat strategi dan partisipasi Save the Children dalam mengatasi permasalahan anak di berbagai

negara salah satunya Indonesia (Wimartha, Walangara Nau, and Simanjuntak 2023, 83). Penelitian ini menemukan hasil yang positif, yang mana program Save the Children berhasil dijalankan dan permasalahan pekerja anak di beberapa wilayah sudah menghasilkan perubahan meskipun belum sepenuhnya terselesaikan (Wimartha, Walangara Nau, and Simanjuntak 2023, 93).

Tinjauan pustaka ketiga yang ditulis oleh Taufan Herdansyah Akbar, Yuswari O Djemat, Nur Annisa dan Mahesvara Sahastiadi yang berjudul “Peran Save the Children Dalam Melindungi Pekerja Anak Di Kawasan Industri Sepatu Cibaduyut Bandung Jawa Barat Pada Tahun 2017-2019 (2020)”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui peran Save the Children dalam memperjuangkan hak dan perlindungan anak dalam kasus pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut (Akbar et al. 2020, 343). Penelitian ini menyebutkan bahwa program yang dijalankan Save the Children tidak efektif dalam menghentikan kasus pekerja anak, namun organisasi internasional ini membantu anak-anak dalam memperoleh hak-hak nya (Akbar et al. 2020, 349).

Melalui tiga tinjauan pustaka di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan metode penelitian dengan tinjauan pustaka kedua dan ketiga yaitu kualitatif. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan ketiga jurnal diatas terkait peran Save the Children serta hak-hak anak, namun pada jurnal kedua dan ketiga memiliki fokus pada beberapa kasus secara spesifik terhadap pekerja anak di wilayah Sulawesi Selatan dan Cibaduyut, Bandung. Sedangkan pada jurnal pertama, membahas upaya perlindungan dan hak-hak dasar anak secara umum dan terdapat perbandingan dengan Save the Children Inggris.

Maka dari itu, penelitian ini memiliki kebaruan topik karena berfokus pada program Save the Children Indonesia periode 2022-2023 secara menyeluruh, bukan hanya pada kasus wilayah tertentu. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan peran organisasi tersebut dalam mendukung tujuan global untuk anak tahun 2030 (Save the Children Indonesia 2024, 6).

1.6 Kerangka Pemikiran

Pembahasan *NGO Roles in International Politics* dalam buku *NGOs in International Politics* karya Shamima Ahmed dan David M. Potter (2006), terdapat tiga bentuk peran NGO dalam politik internasional, yaitu *Relief, Social and Economic Development*, serta *Political Roles*. Dalam pembahasan ketiganya menjelaskan evolusi peran NGO, mulai dari bantuan kemanusiaan darurat, pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang, hingga keterlibatan aktif dalam proses politik dan advokasi kebijakan.

Pertama, *Relief* merupakan peran NGO yang berfokus pada pemberian bantuan darurat dalam merespon situasi krisis seperti bencana alam, konflik, dan keadaan darurat lainnya (Ahmed and Potter 2006, 38). Peran ini ditandai dengan respon cepat dalam pemberian bantuan kebutuhan dasar, seperti makanan, obat-obatan, tempat tinggal sementara, dan lainnya. Meski bantuan tersebut bersifat jangka pendek, namun peran *Relief* dapat menegaskan kehadiran NGO di tengah masyarakat.

Kedua, *Social and Economic Development* menandai pergeseran peran tradisional NGO dari pemberian bantuan jangka pendek menjadi bantuan jangka panjang untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi pada negara

berkembang (Ahmed and Potter 2006, 40). Pada peran ini juga dijelaskan mengenai konsep *Relief-Development Continuum* sebagai upaya menghubungkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, CARE International menjalankan program pembangunan berbasis komunitas untuk melawan kemiskinan dengan menjalankan program pembangunan kepada komunitas rentan (Ahmed and Potter 2006, 41).

Ketiga, *Political Roles* yang digambarkan dengan keterlibatan NGO dalam aktivitas politik dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, korporasi, atau organisasi antar-pemerintah (IGO) (Ahmed and Potter 2006, 43). Peran ini dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan.

Advocacy and Lobbying merupakan peran politik utama NGO di tingkat internasional. *Advocacy* dipahami sebagai upaya NGO dalam memperjuangkan isu-isu struktural melalui berbagai strategi. Di sisi lain, *lobbying* merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan *advocacy*. NGO secara aktif berusaha mempengaruhi pengambilan kebijakan dengan melobi pemerintah negara sendiri maupun negara lain, dan organisasi internasional (Ahmed and Potter 2006, 44).

Public Education and Consciousness Raising merupakan kegiatan NGO dalam melakukan penyebaran informasi dalam menyampaikan argumen. Strategi ini bertujuan untuk mendidik publik sehingga mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih kritis (Ahmed and Potter 2006, 46).

Agenda Setting menggambarkan peran NGO dalam membawa suatu isu ke dalam agenda politik agar menjadi perhatian para pembuat kebijakan (Ahmed and Potter 2006, 48). Dengan begitu NGO seringkali menunjukkan cara pandang baru kepada publik dan pemerintah untuk mendapat opsi baru dalam penyelesaian

masalah. Ribuan NGO juga terlibat secara langsung di berbagai konferensi internasional, yang kemudian status konsultatif memberikan tempat yang sah dalam sistem politik yang berarti NGO memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan (Ahmed and Potter 2006, 53).

Monitoring Other Transnational Actors merupakan peran NGO dalam mengawasi dan memastikan negara, organisasi internasional, serta perusahaan multinasional mematuhi hukum dan perjanjian internasional yang telah disepakati (Ahmed and Potter 2006, 50 & 51).

Melalui kerangka tersebut, NGO berperan dalam memastikan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan, menjadi perhatian utama bagi kesejahteraan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Save the Children Indonesia menjalankan perannya dalam membantu pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, khususnya pada tahun 2022-2023. Sehingga, kerangka NGO Roles in International Politics akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis peran Save the Children Indonesia dalam pemenuhan hak anak Indonesia, dengan mengidentifikasi aspek *Relief, Social and Economic Development*, dan *Political Roles*.

Dalam penerapan konsep ini, ketiga peran tersebut bukan tahapan yang harus dilakukan secara berurutan maupun saling bergantung. Ketiganya digunakan sebagai tipologi yang berbeda dalam menganalisis satu isu yang sama, yaitu Peran Save the Children Indonesia dalam pemenuhan hak anak Indonesia tahun 2022-2023. Oleh karena itu, *Relief, Social and Economic Development*, dan *Political Roles* digunakan sebagai kategori yang saling melengkapi untuk melihat bagaimana

bentuk peran yang dijalankan Save the Children Indonesia secara menyeluruh dalam mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia.

1.7 Argumen Sementara

Save the Children Indonesia menjalankan ketiga peran utama NGO sesuai dengan konsep *NGO Roles in International Politics*. Pada *Relief*, mereka aktif memberikan bantuan darurat bagi masyarakat khususnya anak yang terdampak bencana. Dalam *Social and Economic Development*, berbagai program dijalankan seperti pemberdayaan, pendidikan, dan kesehatan yang bertujuan membangun masyarakat yang berkualitas. Terakhir, *Political Roles*, mereka berperan aktif dalam advokasi, *lobbying*, dan *agenda setting* dalam memperjuangkan kebijakan adil bagi anak. Semua peran dan program secara jelas di unggah pada website resmi Save the Children Indonesia. Melalui peran tersebut, Save the Children Indonesia tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial di Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri atas :

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif. Metode ini bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis dan tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik (Murdiyanto 2020, 19).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Save the Children Indonesia. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah perannya dalam pemenuhan hak anak Indonesia periode 2022-2023 dengan mengidentifikasi tiga aspek utama dalam konsep *NGO Roles in International Politics*

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari pihak lain (Murdiyanto 2020, 53). Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel daring, buku, serta laporan resmi dari organisasi.

1.8.4 Proses Penelitian

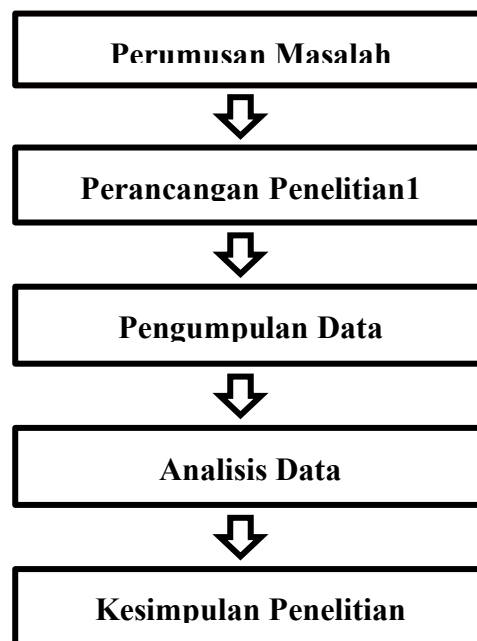


Diagram 1. Diagram Alur Penelitian

Proses penelitian diawali dengan perumusan masalah berdasarkan kesenjangan penelitian (*research gap*). Setelah itu, akan dilakukan perancangan

penelitian yang mencakup penentuan fokus, pendekatan, serta kerangka teori yang digunakan. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui jurnal, artikel daring, buku, serta laporan resmi dari organisasi. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses identifikasi dan pengkajian isi dokumen berdasarkan fokus penelitian.. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Tahap akhir penelitian menghasilkan temuan yang disusun dalam laporan penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas empat bab utama, yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian.

BAB 2 : PERMASALAHAN HAK ANAK INDONESIA, DAN PROFIL SAVE THE CHILDREN INDONESIA

Pada bab kedua akan membahas bagaimana dan mengapa permasalahan hak anak terjadi di Indonesia, serta membahas profil umum Save the Children Indonesia.

BAB 3 : PERAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA DALAM MEMBANTU PEMENUHAN HAK-HAK DI ANAK INDONESIA TAHUN 2022-2023

Pada bab ketiga akan menganalisis implementasi teori yang dipilih untuk melihat bagaimana Save the Children Indonesia berperan dalam pemenuhan hak anak indonesia pada tahun 2022-2023.

BAB 4 : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

PERMASALAHAN HAK ANAK INDONESIA DAN PROFIL SAVE THE CHILDREN INDONESIA

2.1 Permasalahan Hak Anak Indonesia

Permasalahan hak anak di Indonesia merupakan isu yang terus berulang dan bersifat kompleks karena melibatkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan publik. Pada dasarnya hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah, juga negara (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas hidup, tumbuh dan berkembang, identitas, pendidikan, perlindungan, kesehatan, serta partisipasi (Republik Indonesia 2014). Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain UU tentang perlindungan anak, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dengan harapan dapat memberikan keadilan bagi setiap anak di Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2020). Meskipun berbagai peraturan terkait dengan perlindungan anak telah disahkan, tetapi implementasi di lapangan seringkali bertolak belakang. Menurut Arifah Fauzi, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan dan layanan bagi para korban masih belum maksimal karena sebagian besar korban merasa kurang aman untuk melapor (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia 2025). Melalui situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat jumlah kekerasan yang tercatat setiap tahunnya, dimana jumlah kekerasan di Indonesia terus meningkat. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tidak menjamin tercapainya hasil yang efektif jika dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan yang belum terselesaikan.

Berbagai bentuk pelanggaran hak anak seringkali terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, serta praktik-praktik yang menghambat tumbuh kembang mereka. Dalam UU perlindungan anak, orang tua dan keluarga merupakan institusi pertama yang wajib menjamin terpenuhinya hak anak (Republik Indonesia 2014). Namun realitanya seringkali keluarga malah menjadi penghambat anak-anak mendapatkan haknya. Kasus perceraian, keluarga miskin, *fatherless*, perilaku ayah atau ibu yang salah, serta permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu kegagalan keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2014).

Berbagai perilaku orang tua seringkali tidak disadari dan bersifat kultural dapat menghambat tumbuh kembang anak. Seringkali kebiasaan orang tua yang secara berlebihan membatasi aktivitas fisik dan eksplorasi anak, di mana hal ini dapat menghambat perkembangan motorik kasar yang akan berdampak di kemudian hari (Sopia 2019). Kemudian hal tersebut bertentangan dengan Konvensi Hak Anak pada Pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan bermain, juga turut serta dalam kegiatan budaya dan kesenian (UNICEF, n.d.). Hal tersebut sejalan dengan UU No.35 Tahun 2014 Pasal 56, yang

juga menekankan bahwa bermain merupakan bagian dari hak anak yang setara dengan hak-hak anak lainnya (Republik Indonesia 2014).

Pada dasarnya anak-anak masih bergantung pada orang dewasa, dimana ketergantungan tersebut menjadikan mereka sebagai makhluk yang tidak berdaya sehingga sering menerima diskriminasi maupun kekerasan. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga rumah tangga yang menjadi tempat kasus kejadian terbanyak di Indonesia (Pusiknas Bareskrim Polri 2025). Selain itu, sekolah sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan terkadang melakukan kekerasan maupun diskriminasi terhadap anak (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2014). Tahun 2022 merupakan masa transisi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak kompleks bagi bidang perlindungan anak secara langsung maupun tidak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 menerima 2.133 kasus pada klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) dengan jenis kasus tertinggi pada kekerasan seksual sebanyak 834 kasus (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2023).

Angka ini menunjukkan bahwa anak Indonesia masih sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual dalam ranah domestik maupun pendidikan (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2023). Pada kasus kekerasan seksual, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus terbanyak sejumlah 56 aduan (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2023). Selain itu, 1.960 pengaduan pada klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan angka tertinggi kasus pelanggaran hak anak terjadi pada korban konflik keluarga sebanyak 479 kasus (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa regulasi

perlindungan anak belum efektif karena keluarga justru kerap menjadi sumber pelanggaran hak anak.

Dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2023 klaster PKA menerima 823 aduan dengan 358 aduan terkait kekerasan seksual (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2024, 23). Dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual masih menjadi klaster kasus tertinggi di tahun 2023 meskipun jumlah aduan kasus yang jauh menurun. Penurunan jumlah aduan juga tercatat pada klaster Pemenuhan Hak Anak, dengan total 1.833 aduan dan sebagian besar berasal dari klaster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan 1.524 jumlah kasus (Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2024, 5 & 7). Meskipun jumlah tersebut menjadi yang tertinggi, namun angka tersebut jauh lebih rendah dibanding tahun 2022 pada klaster yang sama.

Penurunan tersebut tidak berarti kondisi pelanggaran hak anak Indonesia membaik. Dikutip oleh ANTARA, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak meningkat tiga kali lipat pada tahun 2023 dibanding tahun 2022. Pada tahun 2022, tercatat 957 pengaduan kasus kekerasan anak, sedangkan 2.797 anak menjadi korban dari 1.044 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023 (Dewi 2024). Perbedaan temuan data antara KPAI dan KemenPPPA menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan hak anak di Indonesia tidak hanya terletak pada tingginya kasus. Ketidakselarasan sistem serta mekanisme pendataan dapat menjadi penghambat dalam penanganan kasus perampasan hak anak.

Kondisi perlindungan anak semakin kompleks dengan adanya pandemi COVID-19. Sesuai dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana negara harus melindungi hak-hak anak termasuk dalam kondisi pandemi,

yang berimbas tidak hanya pada kesehatan tetapi juga keberlangsungan hidup anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 2021). Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia 2020). Dalam konteks perlindungan anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan risiko tidak terpenuhinya kebutuhan anak lebih besar, sehingga diperlukan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus agar anak-anak dapat bertahan melewati pandemi (Kantor Staf Presiden 2020).

Untuk memastikan terpenuhinya hak anak di Indonesia, pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, hak anak wajib dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, juga pemerintah (Republik Indonesia 2014). Masyarakat disini tidak hanya perseorangan tetapi juga organisasi kemasyarakatan dan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya negara yang wajib mengupayakan hak anak, tetapi juga melibatkan peran aktif aktor non-negara, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO). Kehadiran NGO (*Non Governmental Organization*) menjadi penting dalam mendukung upaya pemenuhan terhadap hak anak di Indonesia. Di Indonesia banyak NGO yang bekerja untuk anak, baik NGO lokal maupun yang memiliki jaringan internasional. Beberapa NGO yang sudah sejak lama bekerja di Indonesia yaitu Plan International Indonesia, SOS Children's Villages Indonesia, serta Save the Children

Indonesia. Ketiga NGO tersebut secara aktif bekerja untuk anak dengan visi misi yang berbeda.

Plan International Indonesia merupakan NGO yang beroperasi sejak tahun 1937 yang memiliki 75 jaringan internasional. Misi utamanya yaitu mengatasi akar diskriminasi terhadap anak perempuan (Yayasan Plan International Indonesia, n.d.). Selain itu, SOS Children's Villages Indonesia juga aktif mendukung pemenuhan hak anak dengan memastikan setiap anak memiliki keluarga yang aman serta memberikan keluarga pengganti bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan (SOS Children's Villages Indonesia, n.d.). Terakhir yaitu Save the Children Indonesia, yang merupakan organisasi non pemerintah yang berfokus secara menyeluruh pada pemenuhan hak anak.

Save the Children Indonesia dalam laporan tahunan mereka secara jelas menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan serta tumbuh kembang (Save the Children Indonesia 2024). Sebagai bagian dari jaringan global, Save the Children Indonesia memiliki pengalaman panjang dan jejaring kerja sama yang luas dengan pemerintah serta berbagai mitra (Save the Children Indonesia, n.d.). Keunggulan tersebut memungkinkan Save the Children Indonesia dalam menjalankan program secara langsung maupun advokasi kebijakan dan penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia. Hal tersebut menjadikan organisasi ini sebagai aktor penting dalam upaya pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.

2.2 Profil Save the Children Indonesia

Perang Dunia I atau yang juga dikenal sebagai *The Great War*, merupakan

salah satu konflik paling mengerikan dalam sejarah dunia. Dimulai pada tahun 1914 hingga 1918, konflik tersebut menyebabkan lebih dari 8 juta personel militer dan 6,6 juta warga sipil tewas (Blakemore 2019). Peristiwa tersebut mulanya melibatkan sebagian besar negara benua Eropa yang kemudian meluas hingga melibatkan negara-negara di luar Eropa, seperti benua Amerika (Blakemore 2019). Terjadinya Perang Dunia I disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan menyebabkan kehancuran fisik, ekonomi serta memunculkan kesadaran baru untuk memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak.

Sejak awal dimulainya perang, Inggris melakukan blokade laut yang menyebabkan kelaparan sebagian besar warga sipil Jerman. Hingga Perang Dunia Pertama berakhir, Inggris masih mempertahankan blokade tersebut, yang menyebabkan kelaparan berkepanjangan hingga menimbulkan malnutrisi dan rakhitis bagi anak-anak di kota Berlin maupun Wina (Save the Children UK, n.d.). Blokade ini menahan pasokan bahan makanan ke wilayah Jerman dan mengakibatkan sekitar 800.000 penduduk Jerman meninggal selama perang akibat penyakit yang berkaitan dengan kelaparan dan kekurangan gizi (Kramer 2020).

Resah dengan kondisi yang kian memburuk, seorang reformis sosial Inggris dengan nama Eglantyne Jebb melakukan tindakan untuk menyelamatkan anak-anak dari kelaparan. Ia meyakini bahwa anak-anak adalah manusia seutuhnya yang berhak atas hak-hak dasarnya sendiri (Save the Children International, n.d.). Mengetahui sekitar 800 anak meninggal setiap minggu di Jerman mendorong Jebb untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dalam buku karya Clare Mulley, Jebb menyatakan *“Surely it is impossible for us, as normal human beings, to watch children starve to death without making an effort to save them”* (Mulley 2009, 283)

Kesadaran kemanusiaan tersebut mendorong Jebb untuk mengambil tindakan nyata. Bersama saudara perempuannya, Dorothy Buxton, Jebb mendirikan Save the Children Fund di London pada tahun 1919 (Save the Children UK, n.d.). Ini menjadikannya sebagai gerakan global pertama untuk anak-anak (Save the Children US, n.d.). Pendirian organisasi ini pada awalnya didasari oleh keinginan Jebb untuk membantu anak-anak korban perang, namun inspirasi yang melatarbelakanginya lebih jauh adalah upaya menciptakan tatanan sosial yang lebih baik demi kesejahteraan anak-anak sebagai individu (Mulley 2009, 302). Meskipun pada awalnya dianggap melanggar hukum karena memberikan bantuan kepada ‘musuh’, Jebb tetap teguh pada keyakinan moralnya untuk menolong anak-anak tanpa memandang kebangsaan.

Upaya dan gagasan kemanusiaan Eglantyne Jebb tidak berhenti pada pemberian bantuan kemanusiaan semata. Ketika Jebb mendirikan Save the Children, ia juga menyusun *Declaration of the Rights of the Child* atau Deklarasi Hak Anak. Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang kebangsaan, ras, atau agama berhak atas hidup yang layak. Hal tersebut ia lakukan dengan tujuan menjadikan hak dan kesejahteraan anak-anak menjadi tanggung jawab bersama (Save the Children UK, n.d.).

Berkat upaya tersebut, Jebb meninggalkan warisan penting bagi perkembangan hukum dan kemanusiaan internasional. Deklarasi Hak Anak yang ia susun kemudian menjadi tonggak awal lahirnya standar internasional mengenai hak-hak anak dan kemudian diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924. Deklarasi tersebut menjelaskan bahwa semua orang berhutang hak kepada anak-anak terkait hal-hal yang menyangkut masa depannya (UNICEF, n.d.). Selanjutnya

pada tahun 1989, dokumen tersebut diadopsi oleh PBB sebagai Konvensi Hak Anak yang kemudian menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling diterima secara universal dalam sejarah (Save the Children UK 2025).

Seiring berjalannya waktu, Save the Children berkembang dari sebuah gerakan kemanusiaan kecil menjadi jaringan organisasi internasional yang memiliki jangkauan global. Berawal dari keberhasilannya dalam membantu anak-anak korban perang di Eropa, Save the Children mulai memperluas jaringan kerjanya ke wilayah Asia dan Afrika (Save the Children UK, n.d.). Perluasan tersebut menandai transformasi Save the Children dari gerakan yang muncul karena keprihatinan menjadi jaringan global yang beroperasi di lebih dari 120 negara di seluruh dunia (Save the Children Indonesia, n.d.).

Sebagai organisasi internasional yang telah bekerja untuk melindungi hak-hak anak selama lebih dari 100 tahun, Save the Children menjalankan program yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, kekerasan, ketahanan, serta keadaan darurat untuk anak-anak di seluruh dunia (Save the Children International, n.d.). Menjadi organisasi hak anak independen terbesar di dunia, Save the Children berusaha memastikan tidak ada anak yang tertinggal di sudut-sudut terpencil dunia. Dalam menjalankan program untuk anak tersebut, Save the Children bekerja sama dengan banyak mitra serta komunitas dari berbagai sektor.

Selain program jangka panjang dari beberapa fokus tersebut, Save the Children juga aktif dalam berbagai kampanye global untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan kebijakan. Beberapa kampanye global yang dilakukan Save the Children yaitu *Generation Hope* dan *Every Last Child*. *Generation Hope* adalah kampanye global sebagai desakan terhadap krisis iklim

yang dapat mempengaruhi masa depan yang aman bagi anak-anak (Save the Children UK, n.d.). Sementara kampanye *Every Last Child* bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang dapat mencegah jutaan anak bertahan hidup dan belajar (Save the Children International, n.d.). Tentunya masih banyak kampanye lain yang diusung oleh Save the Children untuk memperjuangkan hak-hak anak. Melalui inisiatif tersebut, Save the Children sebagai organisasi independen berperan penting dalam memperjuangkan hak anak di tingkat global dan membentuk standar baru dalam gerakan kemanusiaan modern.

Hingga saat ini, gerakan global Save the Children telah bekerja di lebih dari 120 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, Save the Children mulai beroperasi pada tahun 1976, yang kemudian menjadi salah satu yang pertama dalam merespon tsunami Aceh pada tahun 2004 (Save the Children Indonesia, n.d.). Program tersebut berjalan selama lima tahun dan menjadi program terbesar dalam sejarahnya (Save the Children Indonesia 2024). Hingga tahun 2024, sudah terhitung 48 tahun perjalanan Save the Children Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak anak Indonesia. Tentu perjalanan tersebut penuh rintangan, namun mereka tetap teguh pada komitmen menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi anak-anak Indonesia (Save the Children Indonesia 2024).

Tujuan strategis Save the Children Indonesia yaitu memastikan setiap anak memiliki hak hidup, perlindungan, serta tumbuh kembang di dunia yang aman (Save the Children Indonesia, n.d.). Berkantor pusat di Jakarta Selatan, Save the Children Indonesia menjangkau berbagai wilayah dalam menjalankan program di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hingga akhir tahun 2023, Save the Children Indonesia telah beroperasi di 16 provinsi, 88 kabupaten/kota, 595

kecamatan, dan 1.877 desa di Indonesia (Save the Children Indonesia 2024, 7). Wilayah kerja tersebut mencakup provinsi-provinsi di Jawa, yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan, juga wilayah luar Jawa yang seringkali masih memiliki keterbatasan akses layanan publik terutama di wilayah timur seperti NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, hingga Papua Tengah (Save the Children Indonesia, n.d.). Dalam mendukung keberlanjutan programnya, Save the Children Indonesia memperoleh bantuan pendanaan berbagai korporat, institusi, yayasan, serta donatur individu melalui donasi maupun menjadi anggota Komunitas Pahlawan Anak (Save the Children Indonesia 2024, 7).

Program-program Save the Children Indonesia mencakup berbagai inisiatif, meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan, respon kemanusiaan, serta partisipasi anak. Organisasi ini menggunakan pendekatan yang disebut “Teori Perubahan” untuk menciptakan terobosan inspiratif untuk menciptakan kemajuan yang cepat dan bertahan lama bagi anak-anak Indonesia (Save the Children Indonesia 2024, 5). Setiap tahun, Save the Children Indonesia secara terbuka mempublikasikan laporan keuangan melalui laporan tahunan organisasi sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (Save the Children Indonesia 2024, 33-37).

Dengan keberlanjutan program-program yang dijalankan, tentunya tak luput dari peran anggota Save the Children Indonesia yang bekerja demi kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak Indonesia. Sebagai sebuah organisasi, Save the Children Indonesia memiliki struktur kepengurusan yang disusun secara sistematis untuk memastikan tata kelola yang efisien dan bertanggung jawab. Berdasarkan struktur resmi, organisasi terdiri dari Pembina, Pengurus, Pengawas, serta Tim Penasihat

(Save the Children Indonesia 2025). Pelaksanaan program sehari-hari dipimpin oleh Ketua sekaligus CEO Save the Children Indonesia yang membawahi unit-unit kerja seperti Sekretariat, Keuangan, *Partnership*, *Strategic Program*, *Operations*, *Program Impact*, dan *Creations* (Save the Children Indonesia 2024, 3). Seluruh proses kerja dilandasi prinsip akuntabilitas, ambisi, kolaborasi, kreativitas, serta integritas (Save the Children Indonesia, n.d.). Dengan struktur yang jelas dan mekanisme kerja yang sistematis, Save the Children Indonesia mampu memastikan bahwa setiap anak-anak mendapatkan kehidupan yang layak serta berhak atas masa depan yang lebih baik

BAB 3

PERAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA DALAM MEMBANTU PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI INDONESIA TAHUN 2022-2023

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana implementasi serta peran Save the Children Indonesia dalam pemenuhan hak anak di Indonesia pada tahun 2022-2023. Pada tahun 2022, Save the Children Indonesia menjangkau 748.418 masyarakat Indonesia secara langsung termasuk 451.757 anak-anak. Program yang dijalankan meliputi lima tematik, berupa kesehatan dan gizi, pendidikan, perlindungan anak, kemiskinan, serta tata kelola hak anak (Save the Children Indonesia 2023, 8). Sedangkan pada tahun 2023, terdapat kenaikan jumlah masyarakat yang terdampak oleh program Save the Children Indonesia sejumlah 1.142.045 orang termasuk 680.064 anak-anak (Save the Children Indonesia 2024, 7). Dengan data tersebut akan dilakukan analisis untuk melihat peran Save the Children Indonesia sebagai NGO aktif dalam pemenuhan hak anak di Indonesia. Konteks pandemi COVID-19 juga hadir dalam pelaksanaan program Save the Children Indonesia pada periode penelitian. Tahun 2022 masih merupakan masa transisi pandemi sehingga sebagian besar program masih dipengaruhi oleh COVID-19, sementara tahun 2023 menandai pergeseran fokus menuju pemulihan jangka panjang setelah berakhirnya pandemi.

Analisis akan dilakukan dengan menggunakan konsep *NGO Roles in International Politics* dalam buku *NGOs in International Politics* (Ahmed and Potter 2006, 37). Melalui pendekatan tersebut, peran Save the Children Indonesia dianalisis ke dalam tiga bentuk yaitu, *Relief, Social and Economic Development*, dan *Political Roles*. Pembagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Save the Children Indonesia berkontribusi dalam pemenuhan hak anak di Indonesia

khususnya pada tahun 2022 dan 2023 sebagai tahun transisi pasca pandemi COVID-19. Peran tersebut meliputi perubahan masyarakat dan anak setelah menerima manfaat program serta tantangan yang dihadapi Save the Children Indonesia dalam menjalankan program.

3.1 Peran *Relief* Save the Children Indonesia

Peran *Relief* dalam konsep *NGO Roles in International Politics* merupakan awal mula bagaimana NGO menjalankan perannya dalam bentuk respon cepat terhadap kebutuhan mendesak kelompok rentan, termasuk anak-anak dalam situasi krisis. Konsep *Relief* menyebutkan beberapa contoh NGO, dimana Save the Children sebagai salah satu contoh NGO yang berkembang hingga saat ini yang hadir sejak akhir Perang Dunia I (Ahmed and Potter 2006, 38). Hingga saat ini Save the Children Indonesia terus menjalankan peran *Relief* melalui respon darurat kepada anak dan keluarga yang terdampak bencana alam maupun krisis sosial. Dalam sub bab ini akan menjelaskan peran *Relief* secara khusus pada tahun 2022 dan 2023.

3.1.1 Program *Relief* Save the Children Indonesia tahun 2022-2023

Pada tahun 2022, Save the Children Indonesia menjalankan lebih dari 30 program yang tersebar di 19 provinsi, 128 kabupaten/kota, 820 kecamatan, dan 2.202 desa di Indonesia (Save the Children Indonesia 2023, 8). Dalam konteks ini, pelaksanaan peran *Relief* didominasi oleh respon darurat terhadap bencana alam dan dampak lanjutan pandemi COVID-19, yang secara langsung mengancam keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan anak-anak sebagai kelompok paling

rentan.

Salah satu respon darurat dilakukan pasca gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dan berdampak pada sekitar 13.000 masyarakat pada 25 Februari 2022. Save the Children Indonesia bekerja sama dengan LSM lokal, Jemari Sakato dengan memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak, serta pelatihan bagi guru agar mampu memberikan dukungan serupa secara berkelanjutan (Save the Children Indonesia 2023). Pendekatan ini menunjukkan bahwa intervensi *Relief* tidak hanya bersifat material, tetapi juga menysasar pada pemulihan kondisi psikososial anak dan penguatan kapasitas aktor lokal. Selain itu, Save the Children Indonesia melakukan penyuluhan terkait kebersihan dan mendistribusikan barang non-pangan termasuk *shelter kit*. Hingga akhir Mei 2022, program ini menjangkau 6.833 masyarakat terdampak, termasuk 3.586 anak-anak (Save the Children Indonesia 2023).

Sepanjang tahun 2022, Save the Children Indonesia juga merespon bencana banjir bandang di Ketapang, Lebak, dan Jembrana yang berdampak pada ribuan masyarakat. Respon yang dilakukan tidak berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga fase pemulihan awal. Program-program yang dijalankan Save the Children Indonesia dengan bantuan berbagai mitra telah menjangkau lebih dari 6.000 masyarakat meliputi 2.800 anak-anak (Save the Children Indonesia 2023). Bantuan yang diberikan meliputi distribusi barang non-pangan seperti *shelter kit*, *back to school kit*, penyediaan air bersih, edukasi kesiapsiagaan bencana, praktik *hygiene*, serta promosi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Save the Children Indonesia juga memberikan dukungan kesehatan mental serta bantuan terkait perlindungan anak yang membutuhkan rujukan (Save the Children

Indonesia, n.d.). Kombinasi antara bantuan berbentuk fisik dan edukasi ini memperkuat argumen bahwa peran *Relief* Save the Children Indonesia juga diarahkan untuk mencegah dampak krisis yang berkelanjutan terhadap tumbuh kembang anak.

Selain bencana alam, Save the Children Indonesia juga menjalankan peran *Relief* dalam merespon krisis sosial, salah satunya peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 33 anak meninggal dunia dalam peristiwa tersebut (Save the Children Indonesia 2022). Dalam merespon peristiwa tersebut, Save the Children Indonesia berkoordinasi dengan Dinas PPPA untuk mendukung proses identifikasi dan pendataan anak yang terdampak, khususnya bagi anak yang kehilangan anggota keluarga. Respon ini menegaskan perluasan makna *Relief* dari sekedar bantuan terhadap bencana alam, menjadi perlindungan anak dalam konteks krisis sosial. Save the Children Indonesia juga memberikan layanan pemulihan kondisi psikologis bagi anak dan keluarga korban peristiwa Kanjuruhan (Save the Children Indonesia 2022).

Akhir tahun 2022, tepatnya pada tanggal 21 November terjadi bencana gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo di Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa ini menjadi bencana yang paling banyak mempengaruhi masyarakat, dimana BPBD Cianjur melaporkan setidaknya 62,628 rumah mengalami kerusakan serta berbagai kerusakan infrastruktur termasuk 14 rumah sakit serta 880 sekolah. Terdapat 635 korban meninggal dunia, dimana 37 diantaranya adalah anak-anak (Save the Children Indonesia 2022, 2). Dalam 24 jam pertama, Save the Children Indonesia bersama LPBI NU, PMI, serta SEMAK Foundation melakukan asesmen kebutuhan

prioritas masyarakat Cianjur. Hingga akhir 2022, Save the Children Indonesia berhasil menjangkau 14.118 masyarakat termasuk 7.876 anak-anak di Kabupaten Cianjur (Save the Children Indonesia 2022, 3).

Bantuan yang disalurkan mencakup bantuan barang non-pangan termasuk *shelter kits* dan paket kebersihan, dukungan psikososial yang berhasil menjangkau 2.136 anak dan 157 guru, serta pendirian *Temporary Learning Shelters* (TLS) untuk memastikan keberlanjutan pendidikan anak di Cianjur (Save the Children Indonesia 2022, 4). Selain itu, program WASH meliputi pendistribusian air bersih dan penempatan pompa air di empat kecamatan. Terakhir pada sektor kesehatan dan gizi berupa promosi, konseling, serta skrining kesehatan dan gizi yang menjangkau ribuan anak dan masyarakat terdampak (Save the Children Indonesia 2022, 4). Rangkaian intervensi tersebut menunjukkan upaya Save the Children Indonesia dalam menjaga keberlanjutan perlindungan dan kesejahteraan anak pasca bencana.

Meskipun fase tanggap darurat gempa bumi di Cianjur terjadi pada akhir tahun 2022, tetapi dampaknya masih dirasakan hingga awal 2023. Oleh karena itu, Save the Children Indonesia melanjutkan intervensinya pada tahun 2023 dengan fokus pada pemulihan kesejahteraan anak pasca bencana. Berdasarkan laporan resmi yang diterbitkan pada 10 Maret 2023, jumlah penerima manfaat meningkat signifikan menjadi 69.937 masyarakat termasuk 30.453 anak, menunjukkan perluasan cakupan program dibandingkan tahun sebelumnya (Save the Children Indonesia 2023, 4). Pada fase pemulihan tersebut, Save the Children Indonesia tidak hanya melanjutkan bantuan dasar, tetapi juga memperkuat perlindungan dan pendampingan mental bagi anak melalui koordinasi perlindungan anak dan pendidikan darurat di tingkat kabupaten (Save the Children Indonesia 2023, 3).

Selain itu, program WASH serta kesehatan dan gizi pada tahun 2023 tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mengarah pada pemulihan layanan publik. Save the Children Indonesia memberikan bantuan dan dukungan terhadap PDAM Tirta Mukti berupa perlengkapan teknis dan alat pelindung diri (Save the Children Indonesia 2023, 5). Selanjutnya, pengadaan program *Infant and Young Child Feeding* (IYCF), kegiatan yang diadakan meliputi edukasi, praktik terkait pemberian makan bayi dan anak, juga pendistribusian paket perlengkapan ibu dan bayi (Save the Children Indonesia 2023, 6). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa respon Save the Children Indonesia terhadap bencana juga diarahkan pada proses pemulihan kondisi dan kesejahteraan anak pasca krisis.

Selain respon lanjutan pasca gempa di Cianjur, Save the Children Indonesia juga menjalankan peran *Relief* melalui respon terhadap krisis iklim di Kabupaten Puncak, Papua Tengah yang berdampak pada 8.012 masyarakat termasuk anak-anak (Mahrofi 2023). Pada Agustus 2023, Save the Children Indonesia bersama Yayasan Papua Mandiri (Yapmi), menyalurkan bantuan berupa obat-obatan, makanan bergizi, dan perlengkapan untuk menghadapi cuaca ekstrim termasuk pakaian musim dingin untuk anak-anak (Mahrofi 2023).

Melalui penerapan peran *Relief* pada tahun 2022-2023, Save the Children Indonesia aktif menjalankan berbagai program respon kemanusiaan dalam pemenuhan kebutuhan darurat di wilayah terdampak krisis maupun bencana alam. Dimulai dengan pendistribusian makanan bergizi, obat-obatan, serta barang non-pangan, Save the Children Indonesia memperluas jangkauannya pada perlindungan anak, dukungan psikososial, pendidikan darurat, hingga dukungan layanan publik. Hal tersebut menunjukkan perhatian dan upaya Save the Children Indonesia

membantu memulihkan kehidupan anak dan keluarga yang terdampak bencana di Indonesia. Berbagai edukasi terkait bencana alam pun turut menjadi perhatian Save the Children Indonesia sebagai upaya memperkuat ketahanan anak dan keluarga ke depannya.

3.1.2 Program *Relief* Save the Children Indonesia dalam Merespon Pandemi COVID-19 di Indonesia (2022-2023)

Pandemi COVID-19 di Indonesia berlangsung sejak tahun 2020 yang tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga krisis multidimensi yang mengancam pemenuhan hak anak di Indonesia, terutama hak atas kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial. Menurut data Save the Children Indonesia, sejak awal tahun 2020 hingga 23 November 2022 telah tercatat sebanyak 6.620.317 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, dengan 13,8% merupakan anak di bawah usia 18 tahun (Save the Children Indonesia 2022, 2). Kondisi tersebut berdampak signifikan kepada anak-anak sebagai kelompok rentan, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak merupakan tanggung jawab bersama agar anak-anak dapat bertahan melewati masa pandemi (Kantor Staf Presiden 2020). Oleh karena itu, kompleksitas dampak pandemi terhadap anak di berbagai daerah membuka ruang bagi aktor non-negara seperti Save the Children Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemenuhan hak anak selama pandemi.

Pada tahun 2022, Save the Children Indonesia menjalankan program melalui berbagai aspek dalam merespon dampak pandemi yang dialami anak-anak.

Pada aspek perlindungan anak, Save the Children Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pekerja sosial dalam memberikan pendampingan lanjutan kepada 174 anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 melalui asesmen kebutuhan dan penyusunan rencana intervensi bersama pekerja sosial (Save the Children Indonesia 2022, 3). Selain itu, Save the Children Indonesia juga melatih 29 sumber daya Kesejahteraan Sosial, termasuk pekerja sosial pemerintah hingga masyarakat di tingkat desa dan kecamatan terkait manajemen kasus dan perencanaan permanensi anak (Save the Children Indonesia 2022, 3). Langkah tersebut menunjukkan bahwa respon *Relief* tidak hanya berfokus pada penanganan pada saat kondisi darurat, tetapi juga memperkuat kapasitas sistem perlindungan anak di tingkat lokal.

Pada aspek dukungan psikososial, Save the Children Indonesia melatih 32 fasilitator untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi anak dan remaja guna mendukung intervensi psikososial dalam situasi darurat termasuk pandemi (Save the Children Indonesia 2022, 3). Dalam hal pendidikan, Save the Children berkolaborasi dengan FPRB Bali dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan guru dalam penyusunan SOP evakuasi bencana termasuk dalam masa pandemi (Save the Children Indonesia 2022, 3). Selain itu, dalam upaya mengatasi kesenjangan pembelajaran akibat pandemi, Save the Children Indonesia mendukung kegiatan literasi di Kabupaten Belu dan Malaka melalui penyelenggaraan sembilan komunitas baca masyarakat (Save the Children Indonesia 2022, 3). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan pembelajaran dan dukungan psikososial anak pasca pandemi.

Sementara itu, pada sektor kesehatan dan gizi, Save the Children Indonesia berkontribusi dalam perluasan vaksinasi bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan disabilitas. Perluasan tersebut dijalankan pada 19 kabupaten yang tersebar di lima provinsi, serta bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, RedR, dan UNICEF dalam menyelenggarakan pelatihan terkait gizi dalam situasi darurat kepada staf maupun LSM lokal (Save the Children Indonesia 2022, 4). Keterlibatan tersebut menjadi signifikan mengingat pada Mei 2022 jumlah suntikan vaksinasi COVID-19 mengalami penurunan (Litha 2022). Dalam mendukung upaya tersebut, partisipasi Save the Children Indonesia melalui *VACCINE Project* yang diinisiasi oleh *Australia Indonesia Health Security Partnership* (AIHSP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dipahami sebagai bentuk peran organisasi non-negara dalam mendukung upaya negara untuk memastikan hak kesehatan masyarakat, termasuk anak tetap terpenuhi (Litha 2022).

Memasuki tahun 2023, respon Save the Children Indonesia terhadap pandemi COVID-19 tidak lagi berada pada fase penanganan darurat seiring dengan menurunnya laporan angka COVID-19 di Indonesia. Sehingga, pada tahun 2023 tidak ditemukan laporan terkait respon terhadap COVID-19 oleh Save the Children Indonesia seperti tahun 2022. Meskipun demikian, Save the Children Indonesia tetap menjalankan program vaksinasi yang difokuskan bagi kelompok rentan terutama lansia, yang dijalankan di Desa Ngargotirto, Sragen, serta komunitas Sedulur Sikep di Kabupaten Pati (Save the Children Indonesia 2023; Save the Children Indonesia 2023). Namun, fokus utama bagi anak bergeser pada pemulihan dampak jangka panjang pandemi, khususnya pada sektor pendidikan dan kesejahteraan psikososial anak.

Secara keseluruhan, respon Save the Children Indonesia terhadap pandemi COVID-19 pada tahun 2022-2023 menunjukkan peran *Relief* yang adaptif, dimulai dari pemenuhan kebutuhan mendesak dan perlindungan kelompok rentan hingga dukungan pemulihan hak anak secara berkelanjutan. Perubahan fokus tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan aktor non-negara lain sebagai pelengkap dalam memperkuat sistem perlindungan sosial bagi anak di Indonesia.

3.2 Peran *Social and Economic Development* Save the Children Indonesia

Peran *Social and Economic Development* dalam konsep *NGO Roles in International Politics* muncul sebagai respon atas kesadaran NGO bahwa bantuan kemanusiaan (*Relief*) hanya menjawab kebutuhan jangka pendek dan tidak membantu dalam pembangunan jangka panjang. Bantuan kemudian beralih menuju upaya pembangunan sosial dan ekonomi pada negara-negara berkembang (Ahmed and Potter 2006, 40). Peralihan tersebut didorong oleh keprihatinan terhadap kemiskinan dan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan anak dan keluarga Indonesia. Sebagai bagian dari jaringan internasional, Save the Children Indonesia menjalankan peran tersebut melalui program yang mendukung kesejahteraan anak dan keluarga, yang pada subbab ini akan dianalisis dalam konteks implementasinya pada tahun 2022 dan 2023 dan kaitannya dengan pemulihan jangka panjang dampak pandemi COVID-19.

3.2.1 Program *Social and Economic Development* Save the Children

Indonesia tahun 2022-2023

Sebagai bagian dari peran *Social and Economic Development*, Save the Children Indonesia berupaya menciptakan dampak jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anak dan keluarga. Program yang dijalankan menysasar berbagai sektor, mulai dari kesehatan dan gizi, pendidikan, kesetaraan sosial, hingga ketahanan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2022-2023, Save the Children Indonesia merancang berbagai intervensi untuk menjawab tantangan pembangunan jangka panjang yang mempengaruhi pemenuhan hak anak di Indonesia.

Pandemi COVID-19 tidak hanya mengganggu akses layanan kesehatan dan gizi, tetapi juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian keluarga yang menyebabkan peningkatan tajam terhadap anak-anak yang mengalami *wasting* atau gizi akut di Indonesia (UNICEF Indonesia 2020). Sehingga Save the Children Indonesia bersama Nutrition International mengimplementasikan program *Better Investment for Stunting Alleviation* (BISA) yang menysasar ibu hamil dan menyusui, serta anak usia di bawah dua tahun. Program yang berlangsung selama lima tahun (2019-2024) ini bertujuan mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka *stunting*, khususnya di Provinsi Jawa Barat (Save the Children Indonesia 2024). Kegiatan program meliputi promosi ASI eksklusif melalui pendekatan *Emotional-Demonstration*, dan peningkatan gizi remaja putri melalui konsumsi Tablet Tambah Darah. Pasca pelaksanaan program, terjadi peningkatan pengetahuan tentang pentingnya ASI, dari 61,7% menjadi 81,2%, serta peningkatan pemahaman remaja putri mengenai manfaat Tablet Tambah Darah dari 43,5% menjadi 62,4% (Save the Children Indonesia 2024).

Pada sektor pendidikan dan kesetaraan sosial, Save the Children Indonesia bersama pemerintah daerah Jawa Barat dan pihak sekolah mengembangkan program *We See Equal* dengan dukungan P&G di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Pandemi COVID-19 memperparah kondisi kesetaraan gender bagi anak perempuan di Indonesia, di mana pendidikan yang dilakukan secara *daring* dan akses internet yang belum merata menyebabkan hilangnya kesempatan anak untuk belajar, sehingga ini menjadikan alasan orang tua untuk melakukan perkawinan anak (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2021). Program ini bertujuan mengedukasi terkait kesetaraan gender pada remaja dan kaitannya dengan kesehatan, pendidikan, serta peluang sosial lainnya (Save the Children Indonesia 2022). Selain kegiatan pembelajaran di kelas, program tersebut juga mengadakan penyuluhan bagi orang tua terkait isu kekerasan, perundungan, dan diskriminasi pada anak (Save the Children Indonesia 2022). Program ini sudah dijalankan sejak tahun 2018, dimana hingga pertengahan 2022 sudah menjangkau 30 sekolah dengan total 7.800 murid SMP melalui penerapan Modul *Choices* di Provinsi Jawa Barat (Save the Children Indonesia 2022). Keberlanjutan program tersebut menunjukkan tekad Save the Children Indonesia dalam mendorong sistem pendidikan yang lebih adaptif, serta menciptakan perilaku sosial yang positif bagi generasi muda. Selain itu, dalam mengatasi ketertinggalan akibat pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi, Save the Children Indonesia bersama Yayasan Penmasata dengan dukungan pendanaan dari Sony menjalankan program bernama *Learning Recovery*. Program yang dijalankan di 25 sekolah Nusa Tenggara Timur ini menjadi contoh nyata dari upaya pemulihan jangka panjang pasca pandemi COVID-19 (Save the Children Indonesia 2023).

Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 berdampak pada pendapatan keluarga dan tentunya mengakibatkan keterbatasan dalam pemberian makanan sehat kepada anak, yang dikhawatirkan dapat mengancam kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia (Litha 2020). Dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga, Save the Children Indonesia mengusung program *Resilient Livelihood* yang berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi keluarga dan masyarakat . Pada tahun 2022, sebanyak 22.679 anak dan keluarga menerima bantuan tunai dan kupon, serta 18.481 lainnya mendapat dukungan dalam meningkatkan dan melindungi mata pencahariannya (Save the Children Indonesia 2023, 21). Sedangkan pada tahun 2023, sebanyak 3.501 anak dan keluarga yang menerima bantuan tunai dan kupon, sementara 40.959 lainnya memperoleh dukungan untuk meningkatkan dan melindungi mata pencahariannya (Save the Children Indonesia 2024, 20). Dalam memastikan seluruh kalangan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama, Save the Children Indonesia juga mengadakan program Bursa Kerja Khusus (BKK) bagi pemuda dengan disabilitas. Save the Children Indonesia juga membentuk Kelompok Simpan Pinjam Desa yang didirikan di empat provinsi, yang meningkat dari 562 kelompok pada tahun 2022 menjadi 787 kelompok pada tahun 2023 (Save the Children Indonesia 2023, 21 ; Save the Children Indonesia 2024, 20). Program-program tersebut berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi keluarga agar lebih stabil sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar anak dalam jangka panjang.

Melalui penerapan kerangka *Social and Economic Development*, peran Save the Children Indonesia pada pemenuhan hak anak Indonesia tahun 2022-2023 berdampak langsung pada kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup anak serta

keluarga. Dengan menysasar berbagai sektor dalam menjalankan program, Save the Children Indonesia bersama mitra melaksanakan program-program dengan jangka waktu tertentu untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi anak dan keluarga. Program penguatan kapasitas ekonomi tidak hanya menysasar pada keluarga di Indonesia, tetapi juga melatih remaja disabilitas agar memiliki kesiapan untuk bekerja di masa depan. Beberapa program juga menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan serta perubahan perilaku hidup sehat pada anak-anak.

3.3 Peran *Political Roles* Save the Children Indonesia

Political Roles dalam konsep *NGO Roles in International Politics* merupakan bentuk kesadaran banyak NGO terkait tujuan pembangunan yang tidak hanya menysasar pada ekonomi, tetapi juga bersifat politik (Ahmed and Potter 2006, 42). Semakin banyak NGO yang terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada kelompok rentan, kegiatan tersebut dapat mencakup berbagai bentuk seperti advokasi, lobi kebijakan, *agenda setting*, edukasi publik, hingga pengawasan aktor transnasional lain (Ahmed and Potter 2006, 43-53). Sebagai salah satu NGO yang berambisi dalam memperjuangkan hak anak khususnya di Indonesia, Save the Children Indonesia menjalankan peran-peran tersebut dalam laporan tahunan maupun publikasi resmi pada tahun 2022 dan 2023. Peran tersebut menunjukkan kontribusi Save the Children Indonesia dalam mendorong terciptanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan anak sehingga dapat menjamin hak dan kesejahteraan anak di Indonesia secara berkelanjutan.

3.3.1 Program *Political Roles* Save the Children Indonesia tahun 2022-2023

Keterlibatan politik Save the Children Indonesia yang berkaitan langsung dengan konteks pandemi COVID-19 terlihat melalui partisipasinya dalam mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) PBB pada tahun 2022. Bersama koalisi NGO Indonesia yang bekerja pada isu anak, perempuan, HAM, dan kesehatan, Save the Children Indonesia menyerahkan laporan alternatif kepada *Human Rights Council* yang sebelumnya telah di review oleh *Human rights Working Group* (HRWG) pada Maret 2022 (Save the Children Indonesia 2022). Terkait COVID-19, dalam laporan tersebut Save the Children Indonesia menyoroti ancaman *Zero Dose* yaitu balita yang tidak mendapatkan imunisasi rutin akibat dampak pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari penurunan signifikan Posyandu aktif dari 63,6% pada tahun 2019 menjadi 21% di tahun 2020 dikarenakan larangan mobilitas selama pandemi, yang berdampak langsung pada cakupan imunisasi dasar anak Indonesia (Save the Children Indonesia 2022). Selanjutnya, Save the Children Indonesia mendorong pemerintah untuk mengejar ketertinggalan cakupan imunisasi dasar yang terhambat oleh COVID-19 (Save the Children Indonesia 2022). Keterlibatan tersebut mencerminkan peran *Advocacy and Lobbying* sekaligus *Agenda Setting in the Global Decision-Making Area*, di mana Save the Children Indonesia tidak hanya mendorong perubahan kondisi kesehatan anak dalam negeri, tetapi juga mengangkat isu COVID-19 yang berdampak pada hak kesehatan anak di tingkat global.

Memasuki tahun 2023, peran advokasi Save the Children Indonesia terlihat melalui program *Better investment for Stunting Alleviation* (BISA). Kondisi pandemi COVID-19 mengakibatkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan

dan makanan bergizi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi yang dapat berujung pada stunting (Makarim 2021). Upaya advokasi yang dilakukan berhasil mendorong implementasi strategi nasional penanggulangan stunting di tingkat daerah. Hal tersebut tercermin dari adopsi pendekatan edukasi BISA oleh Pemerintah Kabupaten Kupang melalui surat edaran terkait keberlanjutan program BISA dalam upaya menurunkan angka stunting di tingkat SD dan SMP (Save the Children Indonesia 2023). Program BISA kemudian menjadi kegiatan pendukung bagi Pemerintah Kabupaten Kupang dalam pencegahan stunting, bahkan Kabupaten Kupang telah memiliki fasilitator yang kompeten untuk keberlanjutan kegiatan Program BISA di Kabupaten Kupang (Save the Children Indonesia 2023).

Selain itu, melalui program *Fighting Against Childhood Pneumonia* (FACP), Save the Children Indonesia berhasil melakukan advokasi berkelanjutan yang kemudian menghasilkan penguatan panduan layanan kesehatan, seperti pengembangan lembar balik STOP Pneumonia sebagai rujukan penyusunan panduan Posyandu di tingkat kabupaten (Save the Children Indonesia 2024, 11). Relevansi kampanye ini semakin kuat dalam konteks pandemi COVID-19, di mana keduanya merupakan penyakit pernapasan yang berdampak pada kelompok rentan termasuk anak-anak. Keberhasilan advokasi tersebut tidak terlepas dari strategi kampanye STOP Pneumonia yang diluncurkan Save the Children Indonesia pada tahun 2019, yang terus memberikan dampak pada periode berikutnya. STOP Pneumonia dirancang untuk mendorong perubahan perilaku bagi pendamping dan tenaga kesehatan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko dan langkah pencegahan Pneumonia (Sudrajat et al. 2021, 3). Pada level kebijakan, Save the Children Indonesia bersama berbagai mitra termasuk UNICEF dan mitra

organisasi masyarakat sipil, turut memberikan masukan terhadap rancangan Rencana Aksi Nasional Pneumonia dan Diare yang pada saat itu masih dalam proses finalisasi (Sudrajat et al. 2021, 2). Upaya advokasi tersebut kemudian menghasilkan komitmen kebijakan yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan RI, berupa Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia dan Diare 2023-2030 (Kementerian Kesehatan RI 2023). Save the Children Indonesia selanjutnya turut memastikan pedoman tersebut dapat diimplementasikan hingga ke tingkat desa melalui program FACP, termasuk dengan mengadvokasi penyusunan SOP pelayanan MTBS di 29 Puskesmas Kabupaten Lombok Tengah sesuai standar Kementerian Kesehatan (Kaban 2024).

Pada periode penelitian, peran Save the Children Indonesia dalam *Political Roles* yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 hanya ditemukan melalui advokasi dan *agenda setting*. Namun hal tersebut bukan merupakan kegagalan Save the Children Indonesia menjalankan perannya sebagai NGO maupun bekerja di luar konsep *NGO Roles in International Politics*. Konsep tersebut bersifat tipologi, di mana setiap bentuk peran merupakan kategori analitis yang tidak harus hadir secara keseluruhan dalam setiap isu yang dibahas. Sehingga keterlibatan Save the Children Indonesia dalam aktivitas politik pada periode 2022-2023 tetap mencerminkan kontribusi nyata organisasi tersebut dalam mendorong perubahan kebijakan yang berpihak pada anak di Indonesia.

Dengan keberlanjutan berbagai bantuan yang dijalankan Save the Children Indonesia, pelaksanaan program pada periode 2022-2023 tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan ditemukan dalam upaya perluasan vaksinasi COVID-19 bagi lansia di Desa Ngargotirto pada tahun 2023, perwakilan Save the Children

Indonesia membutuhkan tiga hari untuk membujuk para lansia agar bersedia menerima vaksin (Save the Children Indonesia 2023). Hal serupa juga terjadi di Pati, Jawa Tengah, oleh komunitas adat Sedulur Sikep yang memerlukan hampir setengah tahun untuk bersedia menerima vaksinasi (Save the Children Indonesia 2023). Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya vaksinasi serta masih kuatnya kepercayaan terkait nilai-nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan masyarakat adat. Sebagian besar program Save the Children Indonesia yang dijalankan pada tahun 2022-2023 direalisasikan bersama mitra eksternal sebagai sumber pendanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan program dalam jangka panjang juga dipengaruhi oleh dukungan mitra pendanaan yang terlibat.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga peran NGO yang dijalankan oleh Save the Children Indonesia pada periode 2022-2023, peran *Relief* terlihat lebih dominan diantara kedua peran lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah laporan program maupun jangkauan masyarakat penerima manfaat. Respon darurat yang dilakukan mencakup berbagai isu, baik bencana alam seperti gempa dan banjir, krisis sosial maupun iklim, hingga respon terhadap pandemi COVID-19. Dominasi peran *Relief* tersebut menunjukkan bahwa konteks pandemi dan bencana masih sangat mempengaruhi prioritas kerja Save the Children Indonesia pada periode tersebut.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana Save the Children Indonesia menjalankan perannya dalam pemenuhan hak anak Indonesia pada tahun 2022-2023. Analisis dilakukan menggunakan konsep *NGO Roles in International Politics* yang dalam buku *NGOs in International Politics* dikemukakan oleh Shamima Ahmed dan David M. Potter. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab 3, dapat disimpulkan bahwa Save the Children Indonesia menjalankan ketiga peran utama NGO, yaitu *Relief, Social and Economic Development*, serta *Political Roles* pada periode tersebut.

Permasalahan hak anak di Indonesia terus berulang dan bersifat kompleks karena melibatkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan publik. Pelanggaran hak anak terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, psikis, maupun praktik-praktik yang menghambat tumbuh kembang mereka. Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama, sehingga pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan aktor non-negara, termasuk NGO dalam mendukung upaya pemenuhan hak anak. Dalam hal tersebut, Save the Children Indonesia hadir dengan komitmen untuk memastikan anak-anak memperoleh kesempatan dan perlindungan yang setara tanpa memandang latar belakang mereka.

Dalam peran *Relief*, Save the Children Indonesia merespon berbagai situasi darurat berupa bencana alam, krisis sosial dan iklim, hingga pandemi COVID-19. Wilayah terdampak gempa di Pasaman dan Cianjur, banjir di Ketapang, Lebak, dan Jembrana, krisis iklim di Papua Tengah, hingga peristiwa

Kanjuruhan menjadi bagian dari rangkaian situasi darurat yang direspon Save the Children Indonesia pada periode 2022-2023. Program vaksinasi pada saat pandemi COVID-19 juga dijalankan, khususnya bagi kelompok rentan di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upaya menjangkau masyarakat rentan. Respon yang diberikan tidak hanya berupa bantuan material, tetapi juga mencakup dukungan psikososial dan pendidikan darurat sebagai langkah dalam pemulihan yang lebih menyeluruh. Perubahan yang terjadi pada anak terlihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar selama masa darurat, pemulihan pembelajaran, serta akses terhadap layanan kesehatan, gizi, sanitasi, juga dukungan psikososial sebagai upaya pemulihan psikologis anak pasca bencana.

Pada peran *Social and Economic Development*, Save the Children Indonesia menjalankan berbagai program jangka panjang yang dijalankan pada sektor kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, serta ketahanan ekonomi keluarga. Program-program seperti BISA, *We See Equal*, *Learning Recovery*, dan *Resilient Livelihood* menunjukkan upaya organisasi meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga di Indonesia. Beberapa program mencatat adanya perubahan perilaku serta pengetahuan masyarakat terkait gizi dan kesehatan anak. Hal tersebut terlihat pada program BISA yang menunjukkan peningkatan pengetahuan terkait ASI eksklusif dari 61,7% menjadi 81,2%, serta manfaat Tablet Tambah Darah bagi remaja putri dari 43,5% menjadi 62,4%. Meskipun demikian, keberlanjutan program-program tersebut masih dipengaruhi oleh ketersediaan pendanaan dan kemitraan eksternal yang mendukung pelaksanaan program.

Sementara itu melalui *Political Roles*, Save the Children Indonesia terlibat dalam kegiatan advokasi dan agenda setting yang berkaitan langsung dengan

konteks pandemi COVID-19. Keterlibatan ini mencakup partisipasi dalam *Universal Periodic Review* (UPR) PBB 2022 untuk mendorong pemulihan cakupan imunisasi anak yang terdampak oleh pandemi, advokasi program BISA yang berhasil mendorong Pemerintah Kabupaten Kupang mengadopsi pendekatan edukasi stunting, serta advokasi program FACP yang menghasilkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Pneumonia dan Diare 2023-2030. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa Save the Children Indonesia tidak hanya berfokus pada program di lapangan, tetapi juga berupaya mempengaruhi arah kebijakan terkait hak anak di tingkat nasional maupun global dalam konteks pemulihan pasca pandemi.

Dengan demikian, Save the Children Indonesia berkontribusi dalam membantu pemenuhan hak anak Indonesia tidak hanya melalui bantuan langsung, tetapi juga melalui pembangunan jangka panjang dan perubahan kebijakan. Secara keseluruhan, dari ketiga peran NGO yang dianalisis, peran *Relief* terlihat lebih menonjol dibandingkan *Social and Economic Development* dan *Political Roles*, baik dari segi jumlah program maupun luasnya jangkauan masyarakat penerima manfaat program. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konteks respon darurat dan pandemi pada periode 2022-2023 sangat mempengaruhi arah prioritas kerja Save the Children Indonesia. Di sisi lain, pelaksanaan program tidak terlepas dari berbagai kendala, baik dari kesadaran masyarakat hingga kontribusi mitra lain, khususnya dalam pendanaan program.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder dengan mengandalkan laporan resmi organisasi maupun publikasi daring, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji peran NGO secara lebih mendalam. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara bersama pihak organisasi maupun penerima manfaat program sehingga dapat lebih menangkap dinamika lapangan secara langsung. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan dengan NGO lain yang juga bergerak di bidang hak anak di Indonesia. Perbandingan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terkait kontribusi NGO dalam isu perlindungan anak.

Bagi pemerintah, penelitian ini menemukan adanya ketidakselarasan data antara KPAI dan KemenPPPA terkait kasus kekerasan terhadap anak. Diperlukan perbaikan sistem pendataan yang lebih konsisten antar lembaga agar tidak menghambat upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, mengingat masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh program pemenuhan hak anak, pemerintah diharapkan dapat memperkuat mekanisme kerja sama dengan organisasi non-pemerintah, seperti Save the Children Indonesia, khususnya pada wilayah dengan keterbatasan akses dan daerah terdampak krisis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Shamima, and David M. Potter. 2006. *NGOs in International Politics*. Bloomfield, CT, Connecticut: Kumarian Press, Inc.
- Akbar, Taufan H., Yuswari O. Djemat, Nur Annisa, and Mahesvara Sahastiadi. 2020. "Peran Save the Children dalam Melindungi Pekerja Anak di Kawasan Industri Sepatu Cibaduyut, Bandung Jawa Barat pada tahun 2017–2019." *Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik* 3, no. 02 (August): 341-351. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.212>.
- Aliansi PKTA, Jaringan Aksi, IJF. 2022. "Pernyataan Sikap untuk Memastikan Perlindungan dan Dukungan bagi Anak-Anak Terdampak Konflik Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo." Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/wp-content/uploads/2022/02/Siaran-Pers-Perlindungan-Anak-Konflik-Desa-Wadas.pdf>.
- Blakemore, Erin. 2019. "What caused World War I and what were its effects?" National Geographic. <https://www.nationalgeographic.com/culture/article/world-war-i>.
- C20 Education Sub-Working Group. 2022. *Road to Delivering Education Policy Recommendations for C20 Indonesia Presidency 2022*. Jakarta: C20 Education Sub-Working Group. <https://savethechildren.or.id/wp-content/uploads/2022/10/Report-C20-EdSWG-2022.pdf>.
- Dewi, Anita P. 2024. "Selama 2023, Pengaduan Kasus Kekerasan Anak Naik Tiga Kali Lipat." *ANTARA News*, January 2, 2024. <https://banten.antaranews.com/berita/270063/selama-2023-pengaduan-kasus-kekerasan-anak-naik-tiga-kali-lipat>.
- Gunawan, Galuh H., Zahra P. Listari, and Nurliana C. Apsari. 2021. "Peran Save The Children Sebagai Lembaga Internasional Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak." *JKPS: Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* 2, no. 2 (November): 113-127. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/JKPS/article/view/18650>.
- Huberty, Emmaline S. n.d. "Top 20 Issues Children Are Facing Today." Human Rights Careers. Accessed June 4, 2026. <https://www.humanrightscareers.com/issues/childrens-issues/>.
- Kaban, Hana D. 2024. "Save the Children pastikan edukasi RANPPD Kemenkes sampai ke desa." *ANTARA News*, February 26, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/3983847/save-the-children-pastikan-edukasi-ranppd-kemenkes-sampai-ke-desa>.
- Kantor Staf Presiden. 2020. "Pemerintah Pastikan Pemenuhan Hak Anak Saat Pandemi COVID." Kantor Staf Presiden.

- <https://www.ksp.go.id/pemerintah-pastikan-pemenuhan-hak-anak-saat-pandemi-covid.html>.
- Kementerian Kesehatan RI. 2023. "Pemerintah Berkomitmen Turunkan Kasus Kematian Akibat Pneumonia." Kementerian Kesehatan RI. <https://kemkes.go.id/eng/pemerintah-berkomitmen-turunkan-kasus-kematian-akibat-pneumonia>.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2024. *Peta Jalan (Roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI. <https://jdih.kemnaker.go.id/asset/dok-monografi/Peta%20Jalan-Indonesia-Bebas-Pekerja-Anak.pdf>.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2020. "Presiden Tetapkan Covid-19 sebagai Bencana Nasional." Komdigi. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/presiden-tetapkan-covid-19-sebagai-bencana-nasional>.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2021. "Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan." Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2021. "Pemerintah Jamin Pemenuhan Hak Anak Terdampak Covid-19 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan." Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-jamin-pemenuhan-hak-anak-terdampak-covid-19>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2020. "Indonesia Setelah 30 tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2021. "Pemenuhan Hak Anak, Jangan Kendor Di Masa Pandemi." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/pemenuhan-hak-anak-jangan-kendor-di-masa-pandemi#>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2025. "Menteri PPPA: Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. n.d. "Data Kekerasan." SIMFONI-PPA. Accessed July 10, 2025. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2024. "Pendidikan di Wilayah Terpencil: Tantangan Pemerintah dalam Pemerataan Pendidikan di Indonesia." Sekretariat Negara. https://www.setneg.go.id/baca/index/pendidikan_di_wilayah_terpencil_tantangan_pemerintah_dalam_pemerataan_pendidikan_di_indonesia_1.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2021. "Melihat Dampak Pandemi COVID-19 dan Kebijakan PSBB melalui Kacamata Perempuan Indonesia." Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/kertas-posisi-detail/policy-brief-2-melihat-dampak-pandemi-covid-19-dan-kebijakan-psbb-melalui-kacamata-perempuan-indonesia?utm_source=chatgpt.com.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2014. "Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia." Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2023. "Catatan Pengawasan Perlindungan Anak di Masa Transisi Pandemi ; Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan." Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2024. "Laporan Akhir Tahun 2023 KPAI : Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak." Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/files/2024/11/KPAI-Laporan-Akhir-Tahun-2023.pdf>.
- Kramer, Alan. 2020. "Naval Blockade (of Germany)." 1914-1918 Online International Encyclopedia of the First World War. <https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/naval-blockade-of-germany/#easy-footnote-bottom-2-1088314>.
- Litha, Yoanes. 2020. "Kemiskinan Akibat Pandemi Corona Picu Kerawanan Gizi Anak." VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/kemiskinan-akibat-pandemi-corona-picu-kerawanan-gizi-anak/5415460.html>.
- Litha, Yoanes. 2022. "Laju Vaksinasi COVID-19 Menurun Hampir 50 Persen di Agustus 2022." *VOA Indonesia*, August 28, 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/laju-vaksinasi-covid-19-menurun-hampir-50-persen-di-agustus-2022-/6719975.html>.
- Mahrofi, Zubi. 2023. "Save the Children dan Yapmi Salurkan Bantuan ke Papua Tengah." ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/3703170/save-the-children-dan-yapmi-salurkan-bantuan-ke-papua-tengah>.
- Makarim, Fadhli R. 2021. "Risiko Stunting pada Anak Meningkat selama Pandemi." Halodoc.

- <https://www.halodoc.com/artikel/risiko-stunting-pada-anak-meningkat-selama-pandemi?srsId=AfmBOopc5NTy50ZFHX5Gdp3UWo9wzm99fFniq3UtpNjMjA-4dPFP6iD>.
- Mulley, Clare. 2009. *The Woman Who Saved the Children: A Biography of Eglantyne Jebb: Founder of Save the Children*. N.p.: Oneworld Publications.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press. <http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20Eko%20mUrdiyanto.pdf>.
- Pusiknas Bareskrim Polri. 2025. "Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Rumah Sendiri." Pusiknas Bareskrim Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perempuan_dan_anak_jadi_korban_kekerasan_di_rumah_sendiri.
- PUSKAPA. n.d. "Konvensi Hak-hak Anak: Bagaimana implementasinya di Indonesia? - PUSKAPA." PUSKAPA. Accessed August 21, 2025. <https://puskapa.org/blog/seri-belajar/722/>.
- Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014." Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Save the Children Indonesia. 2022. "Cianjur Earthquake Response Update." Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/wp-content/uploads/2023/02/Save-the-Children-Indonesia-Cianjur-Earthquake-Response-Update-31-Dec-2022.pdf>.
- Save the Children Indonesia. 2022. "Hari Anak Internasional: Save the Children Ingatkan Pentingnya Pemenuhan Hak Anak dari Kelompok Minoritas Agama dan Hak Atas Kesehatan." Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/hari-anak-internasional-save-the-children-ingatkan-pentingnya-pemenuhan-hak-anak-dari-kelompok-minoritas-agama-dan-hak-atas-kesehatan>.
- Save the Children Indonesia. 2022. "Indonesia Covid-19 Response Update." Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/wp-content/uploads/2022/11/SCIDN-COVID-19-Response-Update-2022-11.pdf>.
- Save the Children Indonesia. 2022. "Membantu Orang Tua Memahami Perkembangan Remaja di Program We See Equal." Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/membantu-orang-tua-memahami-perkembangan-remaja-di-program-we-see-equal>.
- Save the Children Indonesia. 2022. "Mendukung Perkembangan Anak lewat Modul Choices We See Equal." Save the Children

- Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/mendukung-perkembangan-anak-lewat-modul-choices-we-see-equal>.
- Save the Children Indonesia. 2022. “Peristiwa Kanjuruhan: Save the Children Indonesia Desak Pemerintah dan Penyelenggara Pertandingan Identifikasi serta Berikan Layanan Psikososial pada Anak-Anak yang menjadi Korban atau Kehilangan Orang Tua.” Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/pr1-tragedikanjuruhan>.
- Save the Children Indonesia. 2022. “Suarakan Krisis Iklim, Anak-Anak Sulawesi Tengah Berekspresi lewat Pentas Seni.” Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/suarakan-krisis-iklim-anak-anak-sulawesi-tengah-berekspresi-lewat-pentas-seni>.
- Save the Children Indonesia. 2022. “We See Equal, Membangun Lingkungan Suportif bagi Anak Remaja di Sekolah dan Rumah.” Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/we-see-equal-membangun-lingkungan-suportif-bagi-anak-remaja-di-sekolah-dan-rumah>.
- Save the Children Indonesia. 2023. “Cianjur Earthquake Response Update.” Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/wp-content/uploads/2023/04/SC-IDN-Cianjur-Earthquake-Response-Update-10032023-latest-version-1.pdf>.
- Save the Children Indonesia. 2023. “Kasus Pemerkosaan Anak Perempuan di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah: Usut Tuntas & Berikan Perlindungan pada Anak!” Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/kasus-pemerkosaan-anak-perempuan-di-parigi-moutong-sulawesi-tengah-usut-tuntas-berikan-perlindungan-pada-anak>.
- Save the Children Indonesia. 2023. “LAPORAN TAHUNAN HEALTHIER SMILES.” Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/wp-content/uploads/2023/06/Annual-Report-HS-Kampanye-Sekolah-Sehat-2022.pdf>.
- Save the Children Indonesia. 2023. “Mendekatkan Vaksin pada Komunitas Adat yang Terpinggirkan.” Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/mendekatkan-vaksin-pada-komunitas-adat-yang-terpinggirkan>.
- Save the Children Indonesia. 2023. “Our Disaster Response Stories in 2022 in West Pasaman, Ketapang, Lebak, Jembrana, and Cianjur.” Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/stories/our-disaster-response-stories-in-2022-in-west-pasaman-ketapang-lebak-jembrana-and-cianjur>.
- Save the Children Indonesia. 2023. “Pemkab Kupang Adopsi Pendekatan Edukasi BISA ke Sekolah untuk Turunkan Stunting.” Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/pemkab-kupang-adopsi-pendekatan-edukasi-bisa-ke-sekolah-untuk->

- turunkan-stunting.
- Save the Children Indonesia. 2023. "Pemulihan Pembelajaran Pasca COVID-19 di Belu dan Malaka." Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/pemulihan-pembelajaran-pasca-covid-19-di-belu-dan-malaka>.
- Save the Children Indonesia. 2023. "Peran Pemuda dalam Meningkatkan Cakupan Vaksinasi COVID-19 untuk Lansia di Desa Ngargotirto." Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/peran-pemuda-dalam-meningkatkan-cakupan-vaksinasi-covid-19-untuk-lansia-di-desa-ngargotirto>.
- Save the Children Indonesia. 2023. *ANNUAL REPORT 2022 SAVE THE CHILDREN INDONESIA*. Jakarta: Save the Children Indonesia.
- Save the Children Indonesia. 2024. "Merayakan 48 tahun Dedikasi Perjuangan Save the Children Indonesia." Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/merayakan-48-tahun-dedikasi-perjuangan-save-the-children-indonesia>.
- Save the Children Indonesia. 2024. "Save the Children dan Nutrition International Tingkatkan Kesadaran dan Praktik Gizi Seimbang untuk Cegah Stunting di Indonesia." Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/artikel/save-the-children-dan-nutrition-international-tingkatkan-kesadaran-dan-praktik-gizi-seimbang-untuk-cegah-stunting-di-indonesia>.
- Save the Children Indonesia. 2024. *LAPORAN TAHUNAN 2023 YAYASAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA*. Jakarta: Save the Children Indonesia.
- Save the Children Indonesia. 2025. "Dewan Organisasi." Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/dewan-organisasi>.
- Save the Children Indonesia. n.d. "Kaleidoskop Cerita Program 2022 - Bergerak Bersama, Berpihak pada Anak." Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/kaleidoskop-2022>.
- Save the Children Indonesia. n.d. "Kerja Kami." Save the Children Indonesia. Accessed June 7, 2026. <https://savethechildren.or.id/kerja-kami>.
- Save the Children Indonesia. n.d. "Menciptakan Perubahan Positif Tak Tergantikan untuk dan Bersama Anak-Anak." Save the Children Indonesia. Accessed June 5, 2026. <https://savethechildren.or.id>.
- Save the Children Indonesia. n.d. "Sejarah Kami." Save the Children Indonesia. <https://savethechildren.or.id/sejarah-kami>.
- Save the Children Indonesia. n.d. "Siapa Kami." Save the Children Indonesia. Accessed June 4, 2026. <https://savethechildren.or.id/siapa-kami>.
- Save the Children International. n.d. "100 Years For Children." Save the Children International. Accessed June 7, 2026. <https://www.savethechildren.net/about-us/100-years-children>.
- Save the Children International. n.d. "Every Last Child- The World's Invisible Children." Save the Children International.

- <https://www.savethechildren.net/news/every-last-child-worlds-invisible-children>.
- Save the Children UK. 2025. "UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC)." Save the Children UK. <https://www.savethechildren.org.uk/what-we-do/childrens-rights/united-nations-convention-of-the-rights-of-the-child>.
- Save the Children UK. n.d. "Generation Hope." Save the Children UK. <https://www.savethechildren.org.uk/how-you-can-help/emergencies/climate-crisis/generation-hope>.
- Save the Children UK. n.d. "Our History." Save the Children UK. Accessed June 7, 2026. <https://www.savethechildren.org.uk/about-us/our-history>.
- Save the Children US. n.d. "The History of Save the Children." Save the Children US. Accessed June 7, 2026. <https://www.savethechildren.org/us/about-us/why-save-the-children/history>.
- Sopia, Santi. 2019. "Pentingnya tak Larang Anak Lompat, Memanjat, dan Lari-larian." Republika. <https://ameera.republika.co.id/berita/pprp9j328/pentingnya-tak-larang-anak-lompat-memanjat-dan-larilarian>.
- SOS Children's Villages Indonesia. n.d. "Tentang Kami." SOS Children's Villages Indonesia. Accessed June 5, 2026. <https://www.sos.or.id/tentang-sos>.
- Sudrajat, Tata, Wahdini Hakim, Taskin Rahman, and Rashed Shah. 2021. "'STOP Pneumonia' - A successful advocacy campaign for preventing and protection Indonesia's children from pneumonia." *Public Health of Indonesia* 7, no. 1 (March): 1-4. <https://doi.org/10.36685/phi.v7i1.400>.
- TEMPO. 2024. "Pelayanan Kesehatan Anak Belum Merata, Ini Pesan IDAI." TEMPO. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/pelayanan-kesehatan-anak-belum-merata-ini-pesan-idai-46714>.
- UNICEF Indonesia. 2020. "Indonesia: Angka masalah gizi pada anak akibat COVID-19 dapat meningkat tajam kecuali jika tindakan cepat diambil." UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/angka-masalah-gizi-pada-anak-di-indonesia-akibat-covid-19-dapat-meningkat-tajam>.
- UNICEF Indonesia. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf>.
- UNICEF. n.d. "Child rights and why they matter." UNICEF. Accessed June 4, 2026. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/child-rights-why-they-matter>.
- UNICEF. n.d. "Frequently asked questions on the Convention on the Rights of the Child." UNICEF. Accessed June 4, 2026. <https://www.unicef.org/stories/child-rights-convention-faq>.
- UNICEF. n.d. "History of child rights." UNICEF. Accessed June 7,

2026. <https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights>.
- UNICEF. n.d. “Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia.” Unicef. Accessed June 4, 2026. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- United Nations. n.d. “THE 17 GOALS | Sustainable Development.” Sustainable Development Goals (SDGs). Accessed June 4, 2026. <https://sdgs.un.org/goals>.
- Wimarta, Febrina, Novriest U. Walangara Nau, and Triesanto R. Simanjuntak. 2023. “Implementasi Tujuan Pembangunan Nasional Terkait Eksploitasi : Peran Save the Children Terhadap Kasus Pekerja Anak di Sulawesi Selatan.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (July): 83-95. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i04.761>.
- Yayasan Plan International Indonesia. n.d. “Sejarah Kami.” Plan International Indonesia. <https://planindonesia.org/tentang-kami/>.